



Analisis Audit Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana: Efektivitas, Akuntabilitas dan Kepuasan Masyarakat

Nirma Lestari Ayu Ningsih ^{1*}, Dewi Pertiwi ¹, Putri Maulina ¹, Bunga Pertiwi ¹, Melda Pratiwi ¹, Elvira Damayanti ¹, Junaedi ¹, Muhammad Basri L ¹

¹ Program Studi Terapan Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Bombana, Bombana, Indonesia

*Corresponding author: Nirma Lestari Ayu Ningsih

nirmalestariayuningsi@gmail.com

Artikel Info

Direvisi: 25/08/2026

Diterima: 16/09/2026

Dipublikasi: 24/09/2026

Kata Kunci:

Audit Kinerja;
Akuntabilitas Publik;
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bombana;
Transportasi
Kepulauan; Efektivitas
Pelayaran

Keywords:

Performance Audit;
Public Accountability;
Bombana Transportation
Agency; Archipelagic
Transportation; Service
Effectiveness

Abstrak

Audit kinerja merupakan instrumen penting untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana periode 2025–2026 melalui pendekatan terintegrasi antara evaluasi dokumen internal dan indikator persepsi publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan evaluasi akuntabilitas kinerja kelembagaan dengan survei persepsi masyarakat pada konteks wilayah kepulauan bernuansa transportasi multimoda. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan kerangka analisis audit kinerja yang memadukan triangulasi data melalui observasi, wawancara di empat bidang kerja (Lalu Lintas, Kepelabuhanan, Perairan, dan Perencanaan), pemeriksaan dokumen strategis (Perjanjian Kinerja dan RENSTRA 2021–2026), serta kuesioner eksploratif kepada 10 responden masyarakat. Hasil audit menunjukkan bahwa perencanaan strategis berjalan baik. Namun, efektivitas pencapaian target masih terhambat oleh sistem absensi manual, keterbatasan anggaran pada proyek infrastruktur pelabuhan, serta keterbatasan jaringan penerangan jalan. Penilaian masyarakat memberikan indikasi awal yang cenderung positif terhadap keramahan dan sosialisasi petugas, meski aspek kecepatan dan kecukupan fasilitas masih memerlukan perbaikan. Penelitian ini merekomendasikan digitalisasi pengendalian internal, reorientasi anggaran berbasis risiko, dan edukasi keselamatan pelayaran yang berkelanjutan.

Abstract

Performance auditing serves as a vital instrument to evaluate the effectiveness, efficiency, and economy of government agencies. This study aims to analyze the performance of the Bombana Regency Transportation Agency for the 2025–2026 period through an integrated approach combining internal document evaluation and public perception indicators. The novelty of this research lies in integrating institutional performance accountability evaluation with public perception surveys within the context of an archipelagic region utilizing multimodal transportation. This descriptive qualitative study employs a performance audit analytical framework that utilizes data triangulation via direct observation, semi-structured interviews across four divisions (Traffic, Port Affairs, Waterways, and Planning), strategic document analysis (Performance Agreements and the 2021–2026 Strategic Plan), and an exploratory questionnaire administered to 10 public respondents. Findings reveal that while strategic planning is implemented effectively, performance realization is constrained by manual attendance systems, budget limitations in port infrastructure projects, and limited street lighting coverage. Initial survey indications reflect positive public perception regarding officer courtesy and safety campaigns, though service speed and facility adequacy require further improvement. This study recommends digitalizing internal controls, adopting risk-based budget reallocations, and enhancing maritime safety education.

Pendahuluan

Akuntabilitas publik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam pengelolaan sumber daya negara yang bersumber dari masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut adalah audit kinerja, yaitu suatu proses evaluasi sistematis terhadap efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi penggunaan sumber daya oleh instansi pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agoes (2017) menjelaskan bahwa audit kinerja memberikan nilai tambah berupa opini kewajaran sekaligus rekomendasi perbaikan bagi entitas yang diperiksa, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa audit kinerja merupakan bagian integral dari akuntabilitas sektor publik yang berperan memperkuat transparansi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Dinas Perhubungan sebagai instansi pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan transportasi darat, laut, dan udara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan bertanggung jawab dalam pengaturan, pengawasan, dan pelayanan transportasi guna mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan. Pelaksanaan tugas tersebut memerlukan pengawasan yang berkesinambungan, salah satunya melalui audit kinerja yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menekankan pentingnya pengukuran kinerja berbasis hasil (*outcome*). Selain aspek regulasi, keberhasilan kinerja organisasi sektor publik juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya, sebagaimana ditekankan oleh Ardana dkk. (2012) yang menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan faktor penentu utama keberhasilan kinerja organisasi.

Kabupaten Bombana, sebagai salah satu daerah dengan karakteristik geografis kepulauan dan wilayah pesisir yang luas, memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan transportasi, baik darat maupun laut. Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana dituntut mampu menyediakan layanan transportasi yang berkualitas, mengelola infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan rambu lalu lintas, serta menjamin keselamatan pengguna jasa transportasi. Namun demikian, sebagaimana lazim ditemui pada instansi pemerintah daerah dengan keterbatasan anggaran, terdapat sejumlah indikasi permasalahan awal yang perlu diverifikasi melalui audit kinerja, antara lain belum optimalnya pengelolaan lalu lintas, kurang efektifnya pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan operasional, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi transportasi, serta lemahnya pengawasan terhadap angkutan umum dan angkutan barang.

Penelitian mengenai audit kinerja pada instansi pemerintah daerah telah banyak dilakukan pada berbagai sektor pelayanan publik, namun kajian yang secara spesifik menyoroti Dinas Perhubungan di daerah kepulauan dengan karakteristik transportasi multimoda (darat, laut, dan rencana udara) seperti Kabupaten Bombana masih relatif terbatas. Sebagian besar kajian audit kinerja terdahulu berfokus pada aspek keuangan semata, sementara aspek kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat langsung layanan transportasi belum banyak diintegrasikan secara sistematis ke dalam proses audit. Kesenjangan (*gap*) inilah yang mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan, yaitu untuk memberikan gambaran audit kinerja yang komprehensif dengan menggabungkan pendekatan dokumenter, wawancara kelembagaan lintas bidang, dan survei persepsi masyarakat sebagai satu kesatuan evaluasi.

Penelitian ini juga memiliki relevansi akademik yang signifikan, khususnya dalam konteks pembelajaran mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Aplikasi Publik dan Audit Laporan Kinerja Keuangan Publik pada Program Studi Akuntansi Sektor Publik. Melalui kegiatan audit kinerja secara langsung pada objek nyata, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk menerapkan teori akuntansi sektor publik dalam praktik, memahami proses penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, mengidentifikasi indikator keberhasilan program, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang aplikatif. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan vokasi akuntansi sektor publik yang menekankan keterpaduan antara teori dan praktik secara nyata di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta penggunaan sumber daya publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana; (2) mengevaluasi tingkat kesesuaian antara pelaksanaan program dengan Rencana Strategis (RENSTRA) 2021–2026 dan Perjanjian Kinerja instansi; (3) mengidentifikasi risiko dan dampak yang memengaruhi pencapaian kinerja organisasi; dan (4) menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang diberikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademik, sebagai sarana pembelajaran praktik audit sektor publik, maupun secara praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana dalam merumuskan kebijakan perbaikan pelayanan transportasi yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain audit kinerja (*performance audit*), yaitu suatu metode evaluasi yang bertujuan menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi pelaksanaan program serta penggunaan sumber daya oleh instansi pemerintah. Pendekatan ini dipilih karena data yang dikumpulkan bersifat naratif, dokumenter, dan persepsional, sehingga lebih tepat dianalisis secara deskriptif-interpretatif dibandingkan pendekatan kuantitatif murni. Objek penelitian adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana sebagai instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan transportasi darat, laut, dan udara di wilayah kabupaten tersebut, dengan fokus pemeriksaan pada empat bidang kerja utama, yaitu Bidang Lalu Lintas, Bidang Kepelabuhanan, Bidang Perairan, dan Bidang Perencanaan.

Subjek penelitian terdiri atas dua kelompok. Kelompok pertama adalah pejabat dan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana pada empat bidang kerja yang menjadi narasumber wawancara, dipilih menggunakan teknik *purposive* berdasarkan relevansi jabatan dan tanggung jawab masing-masing terhadap program kinerja yang diaudit. Kelompok kedua adalah masyarakat pengguna layanan transportasi yang menjadi responden kuesioner penilaian kepuasan, berjumlah 10 orang, yang dipilih secara acak sederhana pada masyarakat yang pernah berinteraksi langsung dengan layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, baik dalam bentuk pelayanan administratif maupun pelayanan transportasi darat dan laut.

Penelitian dilaksanakan di lingkungan kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana selama empat minggu, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut. Pada minggu pertama dilakukan tahap persiapan, meliputi penyusunan rencana audit, penentuan ruang lingkup, pembagian tugas tim, serta penyiapan instrumen pemeriksaan berupa pedoman wawancara dan kuesioner. Minggu kedua difokuskan pada pengumpulan data, mencakup dokumen absensi pegawai, dokumen Perjanjian Kinerja, dan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026. Minggu ketiga digunakan untuk pelaksanaan wawancara mendalam dengan pejabat dan pegawai pada empat bidang kerja terkait, guna menggali informasi mengenai proses pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, dan upaya perbaikan yang telah dilakukan. Minggu keempat dialokasikan untuk

penyusunan laporan hasil audit secara sistematis, perumusan kesimpulan, dan penyampaian rekomendasi perbaikan.

Tim pelaksana audit terdiri atas enam anggota dengan pembagian tugas yang jelas untuk menjamin efektivitas dan objektivitas hasil audit: Ketua Tim bertanggung jawab memimpin jalannya audit dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana; petugas Pengumpulan Data bertugas menghimpun data administratif dan dokumen pendukung; petugas Pemeriksaan Dokumen melakukan telaah mendalam untuk mencocokkan isi dokumen dengan standar yang berlaku serta mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian; petugas Wawancara melaksanakan penggalan informasi tambahan dan klarifikasi data dari narasumber; petugas Analisis Data menafsirkan temuan audit dan menyusun dasar kesimpulan; serta petugas Dokumentasi dan Pelaporan menyusun hasil audit dalam bentuk laporan resmi, yang selanjutnya ditinjau ulang oleh petugas Review Internal untuk memastikan konsistensi, kelengkapan, dan kualitas laporan sebelum dipresentasikan.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Pertama, pedoman observasi langsung, yang digunakan untuk menilai kesesuaian antara data yang tercatat pada dokumen dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga diperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan. Kedua, pedoman wawancara semi-terstruktur, yang digunakan untuk menggali informasi mendalam dari pejabat dan pegawai pada empat bidang kerja mengenai proses pelaksanaan program, kendala teknis dan nonteknis, serta upaya perbaikan yang telah maupun akan dilakukan. Ketiga, lembar kuesioner yang terdiri atas sepuluh item pernyataan dengan skala penilaian ordinal (Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Cukup Setuju, Setuju, dan Sangat Setuju), yang disusun untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap keramahan petugas, kecepatan pelayanan, kemudahan informasi, ketepatan waktu layanan, kecukupan fasilitas transportasi, kondisi infrastruktur, efektivitas sosialisasi keselamatan, pengawasan angkutan umum, aksesibilitas informasi program kerja, dan tingkat kepuasan secara umum terhadap pelayanan Dinas Perhubungan.

Prosedur analisis data dilakukan melalui tiga tahap sebagaimana lazim digunakan dalam audit kinerja sektor publik, yaitu: (1) analisis dokumen, dengan menelaah kesesuaian antara pelaksanaan program pada dokumen Perjanjian Kinerja dan RENSTRA dengan realisasi kegiatan di lapangan; (2) analisis hasil wawancara, dengan mengategorikan temuan berdasarkan bidang kerja untuk mengidentifikasi capaian, kendala, dan upaya tindak lanjut pada masing-masing bidang; dan (3) analisis deskriptif kuantitatif sederhana terhadap hasil kuesioner, dengan menghitung frekuensi dan kecenderungan jawaban responden pada setiap item pernyataan untuk menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat. Ketiga sumber data tersebut selanjutnya ditriangulasi untuk memperoleh simpulan audit yang komprehensif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebelum dirumuskan ke dalam analisis risiko, identifikasi dampak, dan evaluasi capaian program kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana.

Hasil dan Pembahasan

Ruang Lingkup dan Objek Audit

Ruang lingkup audit kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana mencakup seluruh aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi darat, laut, dan udara. Audit ini meliputi penilaian terhadap kesesuaian perencanaan program dengan kebutuhan masyarakat, efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya, pencapaian indikator kinerja utama, kualitas pelayanan publik, serta tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Objek audit difokuskan pada program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya Dinas Perhubungan,

termasuk aspek anggaran, administrasi, dan pelayanan publik, dengan tujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan anggaran, akuntabilitas laporan kinerja, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi.

Identifikasi risiko awal sebelum pelaksanaan audit mengungkapkan beberapa area yang berpotensi memengaruhi pencapaian kinerja organisasi, yaitu belum optimalnya pengelolaan lalu lintas yang berisiko menimbulkan kemacetan dan menurunnya keselamatan pengguna jalan; kurang efektifnya pemeliharaan sarana dan prasarana seperti rambu lalu lintas, marka jalan, dan lampu penerangan; keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan operasional; rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas; serta lemahnya pengawasan terhadap angkutan umum dan angkutan barang. Identifikasi risiko awal ini kemudian menjadi acuan dalam menentukan fokus pemeriksaan dokumen dan wawancara pada tahap berikutnya.

Hasil Pemeriksaan Dokumen Administratif

a. Dokumen Absensi

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen absensi pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana periode Januari–Desember 2025 menunjukkan bahwa sistem pencatatan kehadiran telah berjalan dengan baik dan terdokumentasi secara resmi, dilengkapi pengesahan pejabat berwenang, sehingga menunjukkan adanya kepatuhan terhadap ketentuan administrasi kepegawaian. Secara umum, tingkat kehadiran pegawai tergolong baik dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi. Namun demikian, ditemukan kelemahan berupa penggunaan sistem absensi manual yang berpotensi menimbulkan risiko kesalahan pencatatan maupun manipulasi data kehadiran. Temuan ini sejalan dengan prinsip pengendalian internal dalam akuntansi sektor publik, yang menekankan bahwa sistem pencatatan berbasis manual cenderung lebih rentan terhadap kesalahan manusiawi (*human error*) dan kecurangan dibandingkan sistem berbasis elektronik.

b. Dokumen Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan terbukti menjadi instrumen penting dalam memastikan komitmen instansi terhadap pencapaian sasaran strategis. Dokumen ini memuat indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, serta rencana aksi yang menjadi pedoman pelaksanaan program. Hasil audit menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja telah dijalankan sesuai perjanjian, meskipun masih terdapat kelemahan pada aspek pengelolaan anggaran dan konsistensi pelaksanaan kegiatan. Secara keseluruhan, Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai alat akuntabilitas yang memperkuat transparansi dan integritas organisasi, sekaligus menjadi dasar evaluasi keberhasilan maupun perumusan rekomendasi perbaikan pada periode berikutnya.

c. Rencana Strategis (RENSTRA) 2021–2026

RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana mengusung visi "*Terwujudnya Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan*" dan menjadi acuan utama dalam menilai kesesuaian antara perencanaan strategis dengan pelaksanaan program di lapangan. Dokumen ini memuat visi dan misi instansi, tujuan serta sasaran strategis, kebijakan, dan program prioritas yang harus dicapai dalam periode lima tahun. Auditor menggunakan RENSTRA untuk mengukur konsistensi pelaksanaan kegiatan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, serta menilai ketercapaian indikator kinerja utama (IKU). Hasil audit menunjukkan bahwa RENSTRA berperan penting dalam memastikan setiap program yang dilaksanakan tetap sejalan dengan tujuan strategis daerah, sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi kinerja instansi secara keseluruhan.

Hasil Kuesioner Kepuasan Masyarakat

Untuk menilai persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan, dilakukan pembagian kuesioner kepada 10 responden. Ringkasan hasil kuesioner disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan hasil kuesioner kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana

No	Indikator Penilaian	Kecenderungan Jawaban	Kategori
1	Keramahan dan kesopanan petugas	Dominan Setuju–Sangat Setuju	Sangat Baik
2	Kecepatan proses pelayanan	Setuju–Cukup Setuju, sebagian Tidak Setuju	Cukup
3	Kemudahan memahami informasi pelayanan	Dominan Setuju	Baik
4	Ketepatan waktu pelayanan sesuai ketentuan	Setuju–Cukup Setuju	Cukup
5	Kecukupan fasilitas transportasi	Setuju–Cukup Setuju, sebagian Tidak Setuju	Cukup
6	Pemeliharaan infrastruktur transportasi	Dominan Setuju	Baik
7	Efektivitas sosialisasi keselamatan berkendara	Dominan Setuju–Sangat Setuju	Baik
8	Efektivitas pengawasan angkutan umum	Dominan Setuju–Sangat Setuju	Baik
9	Kemudahan akses informasi program kerja	Dominan Setuju–Sangat Setuju	Baik
10	Kepuasan umum terhadap pelayanan	Dominan Setuju–Sangat Setuju	Baik

Source: Data diolah dari hasil kuesioner (2026)

Berdasarkan Tabel 1, pada indikator keramahan dan kesopanan petugas, sebanyak 8 dari 10 responden menyatakan setuju, 1 responden cukup setuju, dan 1 responden sangat setuju — menunjukkan bahwa petugas telah memberikan pelayanan yang baik dan mampu menciptakan hubungan positif dengan masyarakat. Pada indikator kecepatan pelayanan, sebanyak 4 responden menyatakan setuju, 5 responden cukup setuju, dan 1 responden tidak setuju, mengindikasikan bahwa pelayanan sudah cukup baik namun masih terdapat harapan masyarakat akan pelayanan yang lebih cepat dan efisien. Pada indikator kemudahan memahami informasi pelayanan, 9 responden menyatakan setuju dan 1 responden cukup setuju, menunjukkan bahwa informasi yang diberikan Dinas Perhubungan mudah dipahami masyarakat.

Pada indikator ketepatan waktu pelayanan, diperoleh 5 responden setuju, 3 responden cukup setuju, 1 responden tidak setuju, dan 1 responden sangat setuju, mengindikasikan pelayanan pada umumnya telah sesuai waktu yang ditetapkan meskipun masih ada kendala yang perlu diperbaiki. Pada indikator kecukupan fasilitas transportasi, diperoleh 5 responden setuju, 2 responden cukup setuju, 2 responden tidak setuju, dan 1 responden sangat setuju, menunjukkan fasilitas transportasi dinilai cukup memadai namun masih memerlukan peningkatan pada beberapa aspek. Pada indikator pemeliharaan infrastruktur, diperoleh 6 responden setuju, 2 responden cukup setuju, 1 responden tidak setuju, dan 1 responden sangat setuju, mengindikasikan pemeliharaan telah berjalan cukup baik namun perlu ditingkatkan agar pelayanan lebih optimal.

Pada indikator sosialisasi keselamatan berkendara, pengawasan angkutan umum, kemudahan akses informasi program kerja, dan kepuasan umum terhadap pelayanan, mayoritas responden memberikan penilaian positif dengan dominasi jawaban Setuju dan Sangat Setuju, yang menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi, pengawasan, dan diseminasi informasi program kerja Dinas Perhubungan telah berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana dinilai baik oleh masyarakat, dengan aspek terbaik meliputi keramahan petugas, kemudahan informasi, sosialisasi keselamatan, dan aksesibilitas informasi program kerja, sementara aspek yang masih memerlukan perhatian adalah kecepatan pelayanan, ketepatan waktu, kecukupan fasilitas, dan pemeliharaan infrastruktur transportasi.

Hasil Wawancara per Bidang Kerja

a. Bidang Lalu Lintas

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Bidang Lalu Lintas telah melaksanakan berbagai upaya nyata untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban transportasi, di antaranya program sosialisasi kepada pelajar, penyediaan layanan bus sekolah gratis, serta kegiatan edukasi pengguna jalan yang berkontribusi menumbuhkan kesadaran berlalu lintas. Sistem monitoring lapangan yang menekankan kebersihan, kenyamanan, dan keselamatan jasa angkutan, serta pemeriksaan kelayakan kendaraan angkutan umum dan barang, menjadi langkah penting dalam memastikan standar keselamatan terpenuhi. Meskipun data tilang belum tersedia karena keterbatasan regulasi, pengawasan lebih dominan dilakukan melalui pendekatan edukatif dan pengendalian preventif. Seluruh kegiatan tersebut didukung oleh Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dijadikan bukti komitmen Dinas Perhubungan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

b. Bidang Kepelabuhanan

Hasil wawancara pada Bidang Kepelabuhanan menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah merencanakan sejumlah program pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan, namun realisasinya belum sepenuhnya sesuai rencana awal. Program yang berhasil dilaksanakan adalah pembangunan Pelabuhan Puleloma dengan anggaran sebesar Rp700.000.000, meskipun masih terdapat kebutuhan tambahan berupa fasilitas bongkar muat barang yang belum terpenuhi. Sementara itu, rencana pembangunan Pelabuhan Paria dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp30.000.000 tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan dana, meskipun kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan Pelabuhan Paria tetap dilaksanakan dengan anggaran Rp25.000.000. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian program kepelabuhanan masih terbatas pada kegiatan tertentu, sehingga tingkat realisasi belum sepenuhnya sesuai target yang ditetapkan, dan diperlukan dukungan anggaran yang lebih memadai serta perencanaan yang lebih optimal agar seluruh program kepelabuhanan dapat terlaksana secara menyeluruh pada periode berikutnya.

c. Bidang Perairan

Hasil wawancara pada Bidang Perairan menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap kapal penumpang maupun angkutan barang pada berbagai rute, termasuk Sikeli, Donggala, Poleang–Sikeli, serta jalur penyeberangan kapal feri. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan peralatan keselamatan kapal, seperti pelampung, sekoci, baju pelampung (dewasa, anak-anak, dan bayi), jangkar, kompas, tabung pemadam kebakaran, serta perlengkapan P3K. Apabila ditemukan ketidaklengkapan, Dinas Perhubungan memberikan teguran resmi berupa surat peringatan, dengan penekanan khusus pada ketersediaan baju pelampung sesuai kapasitas penumpang. Selain pengawasan teknis, Bidang Perairan juga melaksanakan program rutin berupa sosialisasi keselamatan berlayar kepada masyarakat, khususnya pelajar dan remaja, serta kampanye laut setiap enam bulan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya izin berlayar dan kelengkapan dokumen kapal, meskipun kendala masih ditemui karena sebagian masyarakat kurang peka terhadap aturan meski izin telah diberikan secara gratis. Pelaksanaan pengawasan dan edukasi dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dengan Syahbandar, Kepolisian, Polair, dan TNI Angkatan Laut berdasarkan Surat Keputusan tim yang telah ditetapkan, dengan kegiatan pengawasan yang melekat pada anggaran perjalanan dinas dan lapangan.

d. Bidang Perencanaan

Hasil wawancara pada Bidang Perencanaan menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah menyusun tiga program utama sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, yaitu Program Penunjang Daerah yang bersifat rutin, Program Bidang Perhubungan dan Program Pelayanan, serta Program Penyelenggaraan Lalu Lintas. Program-program tersebut dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan transportasi, pengaturan lalu lintas, serta penguatan fungsi kelembagaan perhubungan di daerah, sekaligus menjadi kerangka acuan bagi bidang-bidang teknis lainnya dalam menjalankan program kerja tahunan.

Analisis Risiko dan Identifikasi Dampak

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara, teridentifikasi empat kategori risiko utama yang memengaruhi pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis risiko dan dampak kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana

Kategori Risiko	Deskripsi Risiko	Dampak yang Ditimbulkan
Risiko Dokumen	Dokumen pendukung kegiatan tidak dapat diakses secara menyeluruh	Lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan kesulitan verifikasi audit
Risiko Anggaran	Keterbatasan anggaran menyebabkan banyak program hanya sebatas rencana	Rendahnya pencapaian target strategis dan ketergantungan pada anggaran periode berikutnya
Risiko Kepatuhan Masyarakat	Kurangnya kepekaan masyarakat terhadap aturan transportasi (mis. izin berlayar gratis)	Meningkatnya potensi pelanggaran keselamatan dan menurunnya efektivitas pengawasan
Risiko Infrastruktur	Pembangunan sarana-prasarana belum menyeluruh (mis. penerangan jalan umum terbatas)	Meningkatnya potensi kecelakaan dan menurunnya kualitas pelayanan transportasi

Source: Hasil analisis tim audit (2026)

Keempat kategori risiko tersebut saling berkaitan dan secara kumulatif memengaruhi capaian kinerja organisasi. Risiko dokumen berdampak langsung pada kemampuan auditor maupun pihak eksternal dalam melakukan verifikasi kinerja secara objektif, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap laporan yang disampaikan instansi. Risiko anggaran menjadi faktor penghambat paling signifikan, sebagaimana tercermin dari tidak terealisasinya pembangunan Pelabuhan Paria dan belum terpenuhinya fasilitas bongkar muat pada Pelabuhan Puleloma. Risiko kepatuhan masyarakat menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak semata bergantung pada kinerja internal organisasi, tetapi juga pada tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan. Sementara itu, risiko infrastruktur khususnya keterbatasan penerangan jalan umum berpotensi menimbulkan konsekuensi langsung terhadap keselamatan pengguna jalan, sehingga memerlukan prioritas penanganan pada perencanaan anggaran periode berikutnya.

Evaluasi Capaian Program Kerja

Analisis temuan program kerja menunjukkan bahwa dari keseluruhan program yang direncanakan, terdapat program yang berhasil dilaksanakan dan program yang belum terealisasi, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Evaluasi capaian program kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana

Status	Program	Keterangan
Terlaksana	Pembangunan Pelabuhan Puleloma	Anggaran Rp700.000.000; fasilitas bongkar muat masih perlu ditambah
Terlaksana	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pelabuhan Paria	Anggaran Rp25.000.000; menjaga fungsi pelabuhan meski pembangunan baru tidak terealisasi
Terlaksana	Sosialisasi Keselamatan Berlayar	Rutin di sekolah dan kalangan remaja; kampanye laut setiap 6 bulan
Terlaksana	Monitoring Kapal Penumpang dan Barang	Rute Sikeli, Donggala, Poleang–Sikeli, dan jalur penyeberangan feri
Terlaksana	Koordinasi Pengawasan Lintas Instansi	Bersama Syahbandar, Polair, dan TNI AL berdasarkan SK tim
Terlaksana	Pengawasan Kelengkapan Keselamatan Kapal	Pemeriksaan rutin pelampung, sekoci, jangkar, kompas, APAR, dan P3K
Tidak Terlaksana	Pembangunan Pelabuhan Paria	Terkendala keterbatasan dana
Tidak Terlaksana	Fasilitas Bongkar Muat Pelabuhan Puleloma	Belum sesuai rencana awal
Tidak Terlaksana	Pembangunan Sarana-Prasarana Transportasi Darat Lainnya	Terkendala anggaran dan prioritas pembangunan daerah
Tidak Terlaksana	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Pembangunan belum menyeluruh, sebagian wilayah belum terlayani

Source: Hasil analisis tim audit (2026)

Berdasarkan Tabel 3, dapat diamati bahwa program-program yang berhasil dilaksanakan umumnya berkaitan dengan kegiatan operasional rutin dan pengawasan berbasis edukasi yang tidak membutuhkan alokasi anggaran besar, seperti sosialisasi keselamatan, monitoring kapal, dan koordinasi lintas instansi. Sebaliknya, program-program yang tidak terlaksana secara konsisten berkaitan dengan kebutuhan investasi infrastruktur berskala lebih besar, seperti pembangunan pelabuhan baru, fasilitas bongkar muat, dan penerangan jalan umum. Pola ini mengonfirmasi temuan pada analisis risiko sebelumnya bahwa keterbatasan anggaran merupakan faktor penghambat utama pencapaian target strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, sehingga pengelolaan prioritas anggaran menjadi aspek krusial yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan periode berikutnya.

Pembahasan

Hasil audit kinerja secara keseluruhan menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana telah menjalankan sebagian besar tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan RENSTRA 2021–2026 dan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan, terutama pada aspek administratif, pengawasan operasional, dan program edukasi keselamatan transportasi. Temuan ini memperkuat pandangan Mardiasmo (2018) bahwa audit kinerja berfungsi memperkuat transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, sebagaimana tercermin dari hasil kuesioner yang menunjukkan penilaian dominan positif terhadap keramahan petugas, kemudahan informasi, dan efektivitas sosialisasi keselamatan. Namun demikian, konsistensi dengan pandangan Agoes (2017) mengenai fungsi audit kinerja sebagai instrumen rekomendasi perbaikan juga tampak jelas dari temuan-temuan kelemahan yang memerlukan tindak lanjut, khususnya pada aspek pengelolaan anggaran, sistem absensi manual, kecepatan pelayanan, dan pemerataan infrastruktur.

Keterbatasan anggaran menjadi benang merah yang menghubungkan berbagai temuan audit, mulai dari tidak terealisasinya pembangunan Pelabuhan Paria, belum terpenuhinya fasilitas bongkar muat Pelabuhan Puleloma, hingga terbatasnya pembangunan penerangan jalan umum. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik umum instansi pemerintah daerah di kawasan berkembang,

sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan SAKIP (Perpres No. 29 Tahun 2014), yang menekankan pentingnya pengukuran kinerja berbasis hasil (*outcome*) agar keterbatasan sumber daya dapat dikelola secara lebih strategis melalui penentuan prioritas program yang tepat sasaran. Di sisi lain, temuan mengenai rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi transportasi — khususnya terkait izin berlayar yang telah diberikan secara gratis namun tetap kurang dipatuhi — menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan publik tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kinerja institusional semata, melainkan juga memerlukan penguatan kesadaran kolektif masyarakat melalui pendekatan edukasi yang berkelanjutan, sebagaimana telah diupayakan Bidang Perairan melalui kampanye laut rutin setiap enam bulan.

Sejalan dengan pandangan Ardana dkk. (2012) mengenai pentingnya sumber daya manusia sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja organisasi, temuan mengenai sistem absensi manual yang masih digunakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana mengindikasikan perlunya penguatan sistem pengendalian internal berbasis teknologi. Digitalisasi sistem kehadiran pegawai, misalnya melalui *fingerprint* atau *face recognition*, tidak hanya akan meningkatkan akurasi pencatatan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan kinerja sumber daya manusia secara lebih objektif dan real-time, sehingga selaras dengan prinsip efisiensi dan efektivitas yang menjadi tujuan utama audit kinerja sektor publik.

Secara keseluruhan, hasil audit kinerja ini memberikan gambaran bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana berada pada kategori kinerja "cukup baik menuju baik", dengan capaian yang kuat pada dimensi pelayanan interpersonal dan program edukatif, namun masih memerlukan penguatan signifikan pada dimensi pengelolaan anggaran, digitalisasi sistem administrasi, dan pemerataan pembangunan infrastruktur fisik. Temuan ini memberikan dasar empiris bagi perumusan rekomendasi perbaikan yang lebih terarah bagi pimpinan instansi dalam menyusun kebijakan periode berikutnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil audit kinerja yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana secara umum telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Rencana Strategis 2021–2026 dan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan, tercermin dari terlaksananya sebagian besar program kerja pada bidang Lalu Lintas, Kepelabuhanan, Perairan, dan Perencanaan, serta penilaian masyarakat yang secara umum positif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Sistem administrasi kepegawaian dan dokumen perencanaan strategis telah berjalan dengan cukup baik dan terdokumentasi secara resmi, menunjukkan tingkat kepatuhan administratif yang memadai. Meskipun demikian, audit ini juga mengungkap sejumlah kelemahan signifikan yang memerlukan perhatian serius, terutama pada aspek pengelolaan anggaran yang menyebabkan sejumlah program pembangunan infrastruktur seperti Pelabuhan Paria dan fasilitas bongkar muat Pelabuhan Puleloma tidak dapat terealisasi sepenuhnya, penggunaan sistem absensi manual yang rentan terhadap risiko kesalahan pencatatan, rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat terhadap regulasi keselamatan transportasi, serta pembangunan penerangan jalan umum yang belum menyeluruh.

Secara argumentatif, penulis berpendapat bahwa akar permasalahan utama yang teridentifikasi dalam audit ini bukan terletak pada kurangnya komitmen institusional Dinas Perhubungan, melainkan pada keterbatasan struktural berupa alokasi anggaran daerah yang belum sepenuhnya proporsional dengan luasnya cakupan wilayah kerja mengingat karakteristik Kabupaten Bombana sebagai daerah kepulauan yang membutuhkan investasi infrastruktur transportasi laut dan darat secara simultan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan kinerja Dinas Perhubungan tidak dapat diselesaikan semata melalui perbaikan manajerial internal, tetapi

juga memerlukan dukungan kebijakan penganggaran daerah yang lebih berpihak pada sektor konektivitas dan keselamatan transportasi publik.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasilnya. Pertama, jumlah responden kuesioner kepuasan masyarakat relatif terbatas (10 responden), sehingga hasil yang diperoleh belum sepenuhnya dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan persepsi masyarakat Kabupaten Bombana secara keseluruhan. Kedua, audit ini bersifat kualitatif deskriptif dengan cakupan waktu yang terbatas (empat minggu), sehingga belum dapat menangkap dinamika kinerja organisasi secara longitudinal. Ketiga, data anggaran dan realisasi program diperoleh terutama melalui wawancara dan dokumen internal, sehingga verifikasi silang dengan laporan realisasi anggaran (LRA) secara menyeluruh masih perlu diperkuat pada penelitian selanjutnya. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan sistem pengendalian internal berbasis teknologi, optimalisasi prioritas alokasi anggaran berbasis risiko, serta penguatan program edukasi keselamatan transportasi yang berkelanjutan sebagai bagian dari strategi peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana pada periode mendatang. Bagi peneliti maupun tim audit selanjutnya, disarankan untuk memperluas jumlah responden kuesioner, memperpanjang periode observasi, serta mengintegrasikan analisis kuantitatif terhadap data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) guna memperoleh gambaran audit kinerja yang lebih komprehensif dan terukur.

Daftar Pustaka

- Agoes, S. (2017). *Auditing: Petunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh akuntan publik* (5th ed.). Salemba Empat.
- Ardana, I. K., Mujiati, N. W., & Utama, I. W. M. (2012). *Manajemen sumber daya manusia*. Graha Ilmu.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2020). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (17th ed.). Pearson Education.
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar* (4th ed.). Erlangga.
- Bastian, I. (2020). *Audit sektor publik*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). *Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik: Dari anggaran hingga laporan keuangan, dari pemerintah hingga tempat ibadah* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik* (3rd ed.). UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran kinerja sektor publik* (5th ed.). BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2015). *Akuntansi sektor publik* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi sektor publik: Organisasi non laba* (3rd ed.). Mitra Wacana Media.
- Rosalin, F., & Ariyanto, D. (2019). Pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi*, 27(1), 1–15. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2019.v14.i01.p01>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi sektor publik*. Pustaka Baru Press.
- Sukmadinata, N. S. (2017). *Metode penelitian pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Wardana, K. K., & Kusuma, I. B. (2020). Analisis akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mendukung good governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 15(2), 190–201. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2020.v15.i02.p05>
- Widodo, J. (2021). *Akuntabilitas dalam pelayanan publik*. Bayumedia Publishing.
- Yunanto, T. (2021). Pengaruh perencanaan strategis terhadap pencapaian kinerja organisasi sektor publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 456–470. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.3.24>